



LAPORAN TAHUNAN 2019



TENTANG SMERU **3**

SAMBUTAN **5**

MOMEN PENTING **8**

KEGIATAN UTAMA **10**

PETA CAKUPAN WILAYAH PENELITIAN **20**

STRUKTUR ORGANISASI **32**

LAPORAN KEUANGAN 2018 & 2019 **35**



LAPORAN TAHUNAN 2019

Penulis: The SMERU Research Institute
 Editor: Budhi Adrianto, Dhanita Putri Sarahtika,
 Gunardi Handoko, Wiwin Purbaningrum
 Foto sampul: Mukti Mulyana/SMERU

--Jakarta: Smeru Research Institute, 2020.

--40p.; 27 cm.

1. Laporan 2. Research

I. Title II. Author

DDC'23 001.4

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute
 Jl. Cikini Raya No.10A
 Jakarta 10330 Indonesia

Agustus 2020



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

The SMERU Research Institute
 @SMERUInstitute
 The SMERU Research Institute
 The SMERU Research Institute
 @smeru.institute
 @riseprogramme.id

TENTANG SMERU

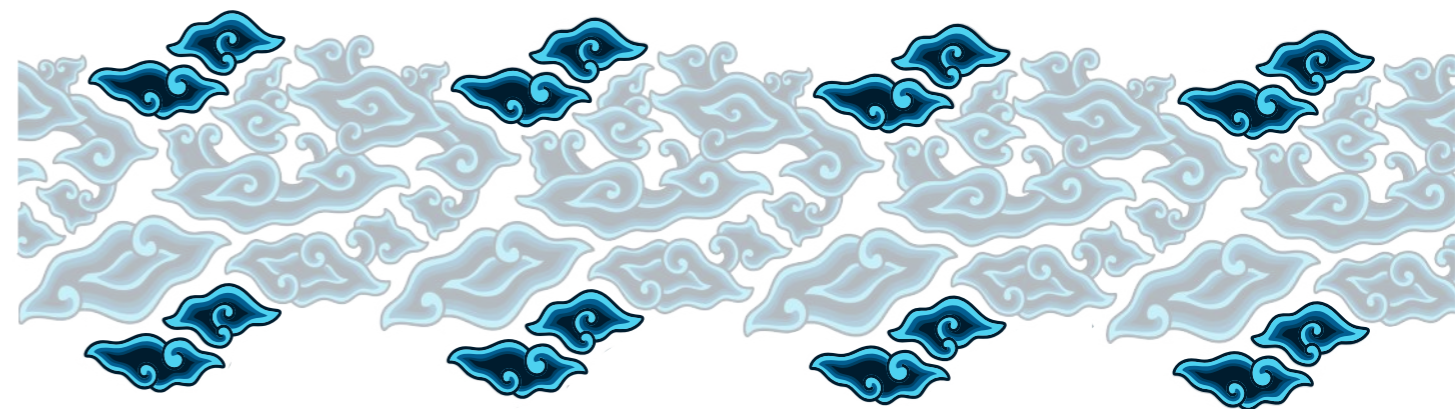
The SMERU Research Institute adalah sebuah lembaga independen yang melakukan studi kebijakan publik dan merupakan lembaga terdepan dalam penelitian di bidang kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia. Kerja penelitian kami berfokus pada berbagai aspek sosial-ekonomi yang sangat penting bagi isu-isu pembangunan kontemporer di Indonesia. Kami mengkhususkan diri pada analisis kemiskinan, penelitian kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi. Ketiga elemen penghasil pengetahuan yang saling berhubungan ini diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti yang tepat bagi orang-orang paling miskin dan rentan di Indonesia.

VISI

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari kemiskinan absolut dan ketidakmerataan yang tinggi melalui penelitian yang bertujuan menghasilkan strategi, kebijakan, dan aksi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan yang berbasis bukti.

MISI

- Melakukan penelitian mengenai berbagai isu terkait kemiskinan guna memperbaiki kebijakan publik dan swasta, serta pelaksanaannya.
- Melakukan penjangkauan efektif kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, masyarakat sipil, kalangan akademis, komunitas internasional, dan sektor swasta.
- Mendukung wacana kebijakan publik dan swasta yang inklusif mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan.
- Memperkuat peran masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dan swasta.



YAYASAN SMERU

PEMBINA

Dr. Sudarno Sumarto (Ketua)
The SMERU Research Institute &
TNP2K, Jakarta

Dr. Syarif Hidayat (Wakil Ketua)
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, Jakarta

Dr. Syaikh Usman (Anggota)
The SMERU Research Institute,
Jakarta

Gregory Churchill, J.D (Anggota)
Konsultan hukum & dosen
(purnatugas)

Dr. Chris Manning (Anggota)
The Australian National University,
Canberra, Australia

Dr. Ruth Stella Petrunella Thei
(Anggota)
Fakultas Pertanian, Universitas
Mataram, Lombok

PENGAWAS

Dr. Asep Suryahadi
(Ketua Pengawas)
The SMERU Research Institute,
Jakarta

Dr. Ilyas Saad
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Swadaya, Jakarta

Bambang Sulaksono, M.M.
The SMERU Research Institute
(purnatugas), Jakarta



Mukti Mulyana/SMERU

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan empat pilar Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tatakelola Pemerintahan. Kami melihat peluang bagi SMERU, sebagai lembaga penelitian, untuk berkontribusi dalam penegakan keempat pilar tersebut. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa dalam melaksanakan tugasnya, perumus kebijakan publik di masa depan makin tergantung pada bukti empiris hasil penelitian. Untuk itu, diperlukan penguatan kualitas riset di bidang pendidikan dan ekonomi dan perluasan diseminasi hasilnya agar sampai kepada pejabat pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. SMERU konsisten berkiprah dalam diskursus pemikiran kritis dan perumusan kebijakan promasyarakat miskin yang berbasis bukti hasil penelitian.

Tahun 2019 merupakan tahun perubahan bagi SMERU. Sejak Agustus, Widjajanti Isdijoso, M.Ec. St., terpilih untuk meneruskan kepemimpinan SMERU menggantikan Dr. Asep Suryahadi. Pada saat yang sama, saya mendapat kehormatan untuk menjadi Ketua Pembina Yayasan SMERU menggantikan Dr. Syaikh Usman. Pergantian kepemimpinan SMERU yang berjalan mulus menjadi pertanda baik bagi keberlanjutan lembaga penelitian ini. Kepemimpinan baru di SMERU diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan dan memperluas jangkauan terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Pada tahun ini SMERU berduka dengan berpulangnya sosok terdandang, Dr. Joan Hardjono, yang hampir dua puluh tahun aktif sebagai Anggota Pembina SMERU. Peran Almarhumah Ibu Joan yang selalu menekankan pentingnya penelitian yang berkualitas dan berintegritas, memberi kontribusi besar atas capaian SMERU selama ini. Sumbangsih beliau sangat besar dalam mengarahkan SMERU menjadi produsen pengetahuan berkualitas seperti saat ini. Selamat jalan Ibu Joan dan terima kasih.

Keseluruhan rekam jejak positif SMERU merupakan keberhasilan bersama. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Asep Suryahadi atas loyalitas, kompetensi, dan dedikasinya selama 10 tahun memimpin SMERU. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Ford Foundation, International Labour Organization (ILO), dan World Bank atas segala dukungan yang memungkinkan SMERU untuk terus melakukan penelitian. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Pemerintah Australia, Pemerintah Inggris, dan Bill & Melinda Gates Foundation yang telah mendanai program Research on Improving Systems of Education (RISE). Kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, bahkan desa yang selama ini ikut menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan penelitian dan pemanfaatan berbagai hasilnya, kami sampaikan rasa hormat. SMERU meyakini bahwa proses perumusan kebijakan berbasis bukti hasil penelitian merupakan cara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 🌊

Sudarno Sumarto

KETUA

PENGURUS

Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St. (Ketua)
The SMERU Research Institute, Jakarta

Athia Yumna, M.Sc. (Wakil Ketua)
The SMERU Research Institute, Jakarta

Nuning Akhmadi, M.Sc. (Sekretaris)
The SMERU Research Institute, Jakarta

Hesti Marsono, M.Sc. (Bendahara)
The SMERU Research Institute, Jakarta

PENASIHAT

Prof. Boediono
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dr. Chris Manning
The Australian National University,
Canberra, Australia

Prof. James J. Fox
The Australian National University,
Canberra, Australia

Dr. Joan Hardjono
Peneliti independen, Bandung

Emeritus Prof. Gavin Jones
The Australian National University,
Canberra, Australia

Prof. Gustav F. Papanek
Boston Institute for Developing
Economies, Boston, Amerika Serikat

Prof. Lant H. Pritchett
Blavatnik School of Government,
University of Oxford, Inggris

Prof. Mohamad Ikhsan
Universitas Indonesia, Jakarta

Dr. Solita Sarwono
Konsultan lepas, Wassenaar, Belanda



Pada Agustus 2019, saya diberi kepercayaan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan The SMERU Research Institute dari Dr. Asep Suryahadi. Ini merupakan sebuah tugas yang tidak mudah mengingat berbagai capaian yang telah diukir SMERU selama periode kepemimpinan beliau. Namun, tentunya saya tetap optimistis karena Dr. Asep Suryahadi tetap mendampingi sebagai salah satu Peneliti Utama SMERU, dan seluruh staf SMERU tetap berkomitmen penuh untuk menjalankan visi dan misi bersama.

Sepanjang 2019, SMERU terus melaksanakan komitmennya untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hasil penelitian. Untuk menjawab kepercayaan yang selama ini diberikan oleh berbagai kementerian/lembaga pemerintah dan mitra pembangunan, SMERU telah menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain yang terkait isu pembangunan perdesaan, pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, pengembangan penghidupan bagi keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pengurangan dan pencegahan kondisi pendek (*stunting*), dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Dengan dukungan Ford Foundation, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Knowledge Sector Initiative (KSI)-DFAT, SMERU membantu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif hingga tingkat kabupaten/kota yang dapat dijadikan landasan penyusunan kebijakan dan alat untuk memonitor kualitas pertumbuhan ekonomi.

Di bidang pendidikan, melalui Program RISE di Indonesia yang didukung oleh RISE Programme, SMERU memberikan rekomendasi kebijakan terkait rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kapasitas guru. Dengan bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat, SMERU melakukan studi untuk mendukung kebijakan penghapusan pekerja anak di sektor pertanian. Dengan dukungan Program MAMPU-DFAT, SMERU juga melakukan studi mengenai akses perempuan ke pelayanan publik. Selain itu, untuk terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin, SMERU juga mulai mengadakan beberapa pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk analis kebijakan dari lembaga pemerintah dan akademisi.

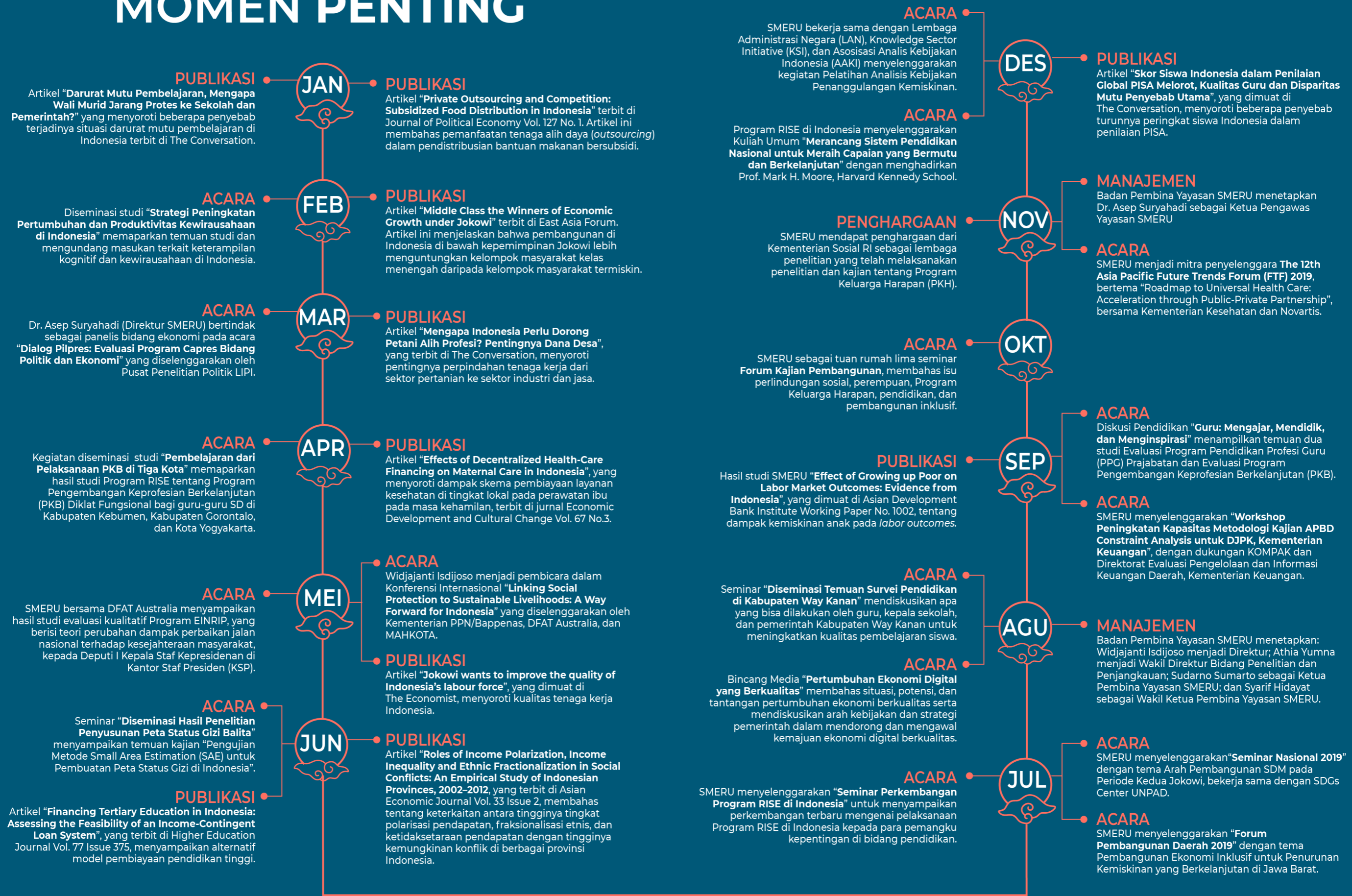
Pada akhir Juli, SMERU kembali menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah (FPD), bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sebuah seminar nasional, bekerja sama dengan SDGs Center Universitas Padjadjaran. Mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya penurunan kemiskinan merupakan suatu kehormatan bagi kami. Pada penghujung tahun, kerja keras seluruh staf dan manajemen SMERU mendapat pengakuan dari pemerintah, melalui Kementerian Sosial, dalam bentuk penghargaan yang diberikan atas kontribusi dalam keberhasilan implementasi PKH.

Tahun ini menandai berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Strategis SMERU 2015–2019. Beberapa catatan tentang keberhasilan dan tantangan selama lima tahun yang telah berjalan menjadi modal berharga bagi SMERU dalam penyusunan Rencana Strategis SMERU 2020–2024, yang diarahkan untuk terus memperkuat kontribusi SMERU dalam pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh staf dan dukungan dari semua mitra SMERU, yang memungkinkan tercapainya semua prestasi tersebut. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dengan memohon restu Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan penuh seluruh staf SMERU, saya akan berupaya sebaik mungkin untuk menjalankan amanah ini. Bersama kita akan dapat mewujudkan visi SMERU, yakni mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. 🌊

Widjajanti Isdijoso
DIREKTUR

MOMEN PENTING



SOROTAN PENELITIAN

MENGURAI MASALAH KRISIS PEMBELAJARAN DI INDONESIA

Sistem pendidikan Indonesia mengalami tantangan besar berupa krisis pembelajaran. Hal tersebut, antara lain dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu perekrutan, penempatan, dan kompetensi guru yang belum merata; serta masih timpangnya tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran dasar. Situasi-situasi inilah yang melatari SMERU untuk tetap menaruh perhatian besar pada isu pendidikan.

Kajian SMERU di bidang pendidikan yang berada di bawah payung Program RISE di Indonesia terdiri dalam dua ranah, yaitu kajian terkait reformasi guru di tingkat nasional dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Program RISE di Indonesia dikelola oleh SMERU bersama Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) dan Mathematica, melalui pendanaan DFID UK, DFAT Australia, dan Bill & Melinda Gates Foundation.

Sepanjang tahun 2019, Program RISE di Indonesia mencatat sejumlah temuan penting. Pertama, penelitian tentang Program Profesi Guru (PPG) menunjukkan bahwa aspek penguasaan materi pengajaran literasi dan numerasi yang didapatkan dari PPG Prajabatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) masih rendah. Kemudian, PPG yang dilakukan bersamaan dengan kuliah lebih efektif bagi mahasiswa program kependidikan karena dapat mengintegrasikan ilmu dari perkuliahan dengan materi PPG. Selain itu, PPG tersebut dapat dilakukan kurang dari satu tahun agar lebih efisien. Kedua, hasil asesmen cepat PPDB SMP menunjukkan bahwa peralihan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis nilai menjadi berbasis jarak membuat lebih banyak siswa berkemampuan rendah masuk ke sekolah negeri.

Sebelum kebijakan zonasi, siswa tersebut biasanya masuk ke sekolah swasta yang memiliki sumber daya lebih sedikit daripada sekolah negeri pada umumnya.

Selain melalui Program RISE, SMERU juga melakukan beberapa kajian di bidang Pendidikan yang lain, yaitu evaluasi program *Global School Leaders* yang didukung Tanoto Foundation, serta kajian Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Pesisir Pantai di Jakarta dan Kajian Penyelenggaraan SMP Terbuka di Jakarta dengan dukungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hasil evaluasi program *Global School Leaders* menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak menyadari rendahnya kualitas pengajaran guru-guru di sekolah. Hal ini disinyalir disebabkan kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang konsep mengajar efektif. Konsekuensinya, kepala sekolah tidak memperbaiki teknik mengajar guru sehingga guru di sekolah tidak mengajar dengan efektif dan kemampuan siswa tidak meningkat. Sementara itu, kajian mengenai sekolah anak pesisir pantai dan kajian penyelenggaraan SMP terbuka memperlihatkan masih perlunya upaya afirmasi untuk meningkatkan akses anak-anak keluarga miskin ke pendidikan yang berkualitas.

SMERU berkomitmen untuk melakukan kajian pendidikan di tahun-tahun berikutnya dengan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas lagi, baik dengan donor, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Hal ini dilakukan agar peningkatan sistem pendidikan di Indonesia didasarkan pada kajian berbasis bukti yang berkualitas. 🐟

- Beri tanda centang (✓) untuk ciri-ciri rumah sehat yang lain!
- Sampah berserakan dimana-mana.
 - Memiliki sumber air yang bersih ✓
 - Halamannya luas.
 - Saluran air tidak mampet.
 - Bangunan rumah harus mewah.
 - memiliki bak sampah sementara.
 - Halaman rumah ditumbuhi tanaman.
 - mempunyai pagar besi yang kokoh.

Penelitian tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan menunjukkan bahwa penguasaan guru atas materi pengajaran literasi dan numerasi yang didapatkan dari PPG Prajabatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) masih rendah.

[Lokasi: Way Kanan, Lampung]

Kredit foto: Novita Eka Syaputri/SMERU

MENGATASI PERSOALAN PEKERJA ANAK DI USAHA PERTANIAN

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2009 sekitar 1,7 juta anak berusia 5-17 tahun merupakan pekerja anak, dan 58% di antaranya bekerja di sektor pertanian. Pada 2019, SMERU setidaknya melaksanakan tiga penelitian yang berkaitan dengan isu pekerja anak di perkebunan tembakau. Penelitian tersebut merupakan kerja sama dengan Yayasan ECLT, International Labor Organization (ILO), dan Philip Morris Internasional (PMI).

Penelitian pertama berjudul “Studi *Baseline* tentang Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau” yang didukung oleh ECLT. Studi ini bertujuan untuk melihat situasi pekerja anak sebelum pelaksanaan program Kemitraan Strategis untuk Menanggulangi Pekerja Anak di Pertanian di Indonesia (KESEMPATAN). Program KESEMPATAN ini disusun sebagai tindak lanjut dari “Studi Diagnostik Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau” yang dilakukan pada 2016. Selain mengukur prevalensi pekerja anak di perkebunan tembakau, studi *baseline* yang dilakukan pada 2019 ini juga mempelajari rancangan dan rencana program. Berdasarkan hasil studi ini, disusun saran-saran untuk perbaikan rancangan program. Studi ini direncanakan sebagai bagian dari studi longitudinal sepanjang 2019–2021, yang diharapkan dapat memberi pembelajaran tentang upaya penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau.

Penelitian kedua mendapat dukungan dari ILO, dan bertujuan untuk mengukur risiko dan bahaya yang dihadapi anak yang bekerja di perkebunan tembakau di Indonesia. Meskipun hasil sementara studi ini menemukan bahwa risiko yang diterima pekerja anak 0,6 kali lebih rendah daripada petani/buruh tani dewasa, mereka tetap rentan terhadap kondisi berbahaya paparan pestisida dan nikotin dari daun tembakau, serta debu dan panas. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih permisif terhadap anak-anak yang bekerja

di perkebunan tembakau, meskipun pemerintah, petugas kesehatan, dan perusahaan tembakau telah menyampaikan larangan adanya pekerja anak di perkebunan tembakau. Masyarakat masih belum menyadari bahaya yang dihadapi pekerja anak tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini dilakukan pengukuran keterpaparan panas dan debu, serta kandungan pestisida dan nikotin pada anak yang bekerja di perkebunan tembakau.

Penelitian yang ketiga secara khusus juga melihat penggunaan alat pelindung diri (APD) di perkebunan tembakau, selain melihat keterlibatan pekerja anak. Studi pemantauan dan verifikasi eksternal dampak Program *Agricultural Labor Practices* (ALP) PMI di Indonesia ini menemukan bahwa hanya sebagian petani tembakau telah menyadari bahaya penggunaan pestisida dan menggunakan APD. Meskipun cukup banyak petani yang memahami perlunya menggunakan APD, sebagian memilih untuk tidak menggunakan APD karena merasa tidak nyaman. Petani yang tidak bermitra dengan perusahaan tembakau multinasional memiliki tingkat kesadaran akan bahaya pestisida yang jauh lebih rendah daripada petani mitra. Namun, jumlah petani yang bermitra jauh lebih sedikit daripada petani yang tidak bermitra. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pestisida dan pentingnya penggunaan APD bagi para petani tembakau yang tidak bermitra.

Ketiga hasil studi SMERU tersebut telah dipaparkan kepada para pemangku kepentingan—baik pemerintah maupun nonpemerintah—dalam berbagai kesempatan. Rekomendasi dari studi yang pertama dan kedua akan menjadi masukan dalam penyusunan program upaya penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau. Sementara itu, rekomendasi dari studi yang ketiga digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan program ALP di Indonesia. 🐟



Anak-anak yang bekerja di perkebunan tembakau 20 kali lebih mungkin terpapar pestisida jika dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja.

[Lokasi: Jember, Jawa Timur]

MEMAHAMI PERMASALAHAN GIZI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan terkait status gizi dan ketahanan pangan. Meski hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi kondisi pendek (*stunting*) di Indonesia menurun, dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018, angka tersebut masih jauh di atas batas toleransi yang ditetapkan WHO, yaitu 20,0%. Selain itu, Indonesia juga menghadapi persoalan kondisi kurus (*wasting*) pada balita dan kecenderungan meningkatnya prevalensi kondisi berat badan berlebih (*overweight*).

SMERU juga menaruh perhatian yang amat serius terhadap persoalan terkait ketahanan pangan dan gizi. Dalam dua tahun terakhir, SMERU melakukan tiga penelitian terkait gizi dan ketahanan pangan dengan sudut pandang, cakupan, dan bentuk kerja sama yang beragam.

Pertama, bekerja sama dengan World Food Program (WFP), SMERU melakukan "Pemutakhiran Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia". Studi ini merupakan pembaruan dari dokumen serupa yang disusun SMERU bersama WFP pada 2014. Kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri, khususnya bahan pangan sumber protein, buah dan sayuran, masih perlu ditingkatkan. Masyarakat Indonesia juga mengalami *triple burden of malnutrition*—kurang gizi, kelebihan kalori, dan kekurangan mikronutrien—karena kelebihan karbohidrat dan gula, serta kekurangan gizi mikro, sayuran dan buah-buahan. Khusus untuk menurunkan prevalensi *stunting*, sejak 2017 Pemerintah telah berupaya untuk melakukan penajaman program, tetapi upaya ini belum efektif karena lemahnya koordinasi antarlembaga dan masih rendahnya pemahaman tentang faktor yang memengaruhi *stunting*.

Kedua, SMERU melakukan "Analisis Pengeluaran Publik untuk Penanggulangan *Stunting* di Tingkat Daerah: Faktor-faktor yang Memengaruhi Variasi Tingkat *Stunting* di Enam Kabupaten/Kota di Indonesia." Studi yang dilakukan bersama Bank Dunia ini menemukan bahwa variasi belanja daerah tidak cukup untuk menjelaskan perbedaan prevalensi *stunting* di wilayah yang diteliti. Penanggulangan *stunting* menghadapi sejumlah tantangan terkait kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi program, serta koordinasi lintas aktor dan sektor.

Terakhir adalah studi yang dilakukan oleh SMERU bersama Bank Dunia dan Yayasan Tanoto untuk mencoba penggunaan Metode Small Area Estimation (SAE) dalam pembuatan peta status gizi di lima kabupaten. Hasil estimasi menunjukkan bahwa model SAE terbukti mampu mengestimasi prevalensi *stunting* hingga tingkat desa. Dalam studi ini juga dilakukan verifikasi melalui sensus antropometri balita di tiga desa di masing-masing kabupaten, yang memperlihatkan bahwa di antara faktor yang berpengaruh terhadap penurunan *stunting* adalah meningkatnya pendidikan orang tua, kesejahteraan masyarakat, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

Dari ketiga studi tersebut, diperoleh gambaran mengenai tantangan perbaikan ketahanan pangan dan gizi di tingkat nasional, daerah, dan masyarakat. Hasil-hasil studi ini akan didiseminasikan secara lebih luas pada 2020 dan dijadikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan terkait. Pengalaman SMERU bekerja sama dengan Yayasan Tanoto juga menunjukkan ketertarikan dan kebutuhan sektor swasta dalam negeri untuk menggunakan bukti-bukti berbasis penelitian dalam rangka meningkatkan efektivitas bantuan yang diberikan sektor swasta kepada pemerintah daerah dan masyarakat. 🐟



Di antara faktor yang berpengaruh terhadap penurunan *stunting* adalah meningkatnya pendidikan orang tua, kesejahteraan masyarakat, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
[Lokasi: Tasikmalaya, Jawa Barat]

MENDUKUNG PENYEMPURNAAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

Isu perlindungan sosial tetap menjadi perhatian The SMERU Research Institute sepanjang 2019. Terdapat setidaknya tiga studi terkait isu tersebut yang disampaikan pada berbagai kesempatan, baik dalam forum akademis maupun forum diskusi kebijakan.

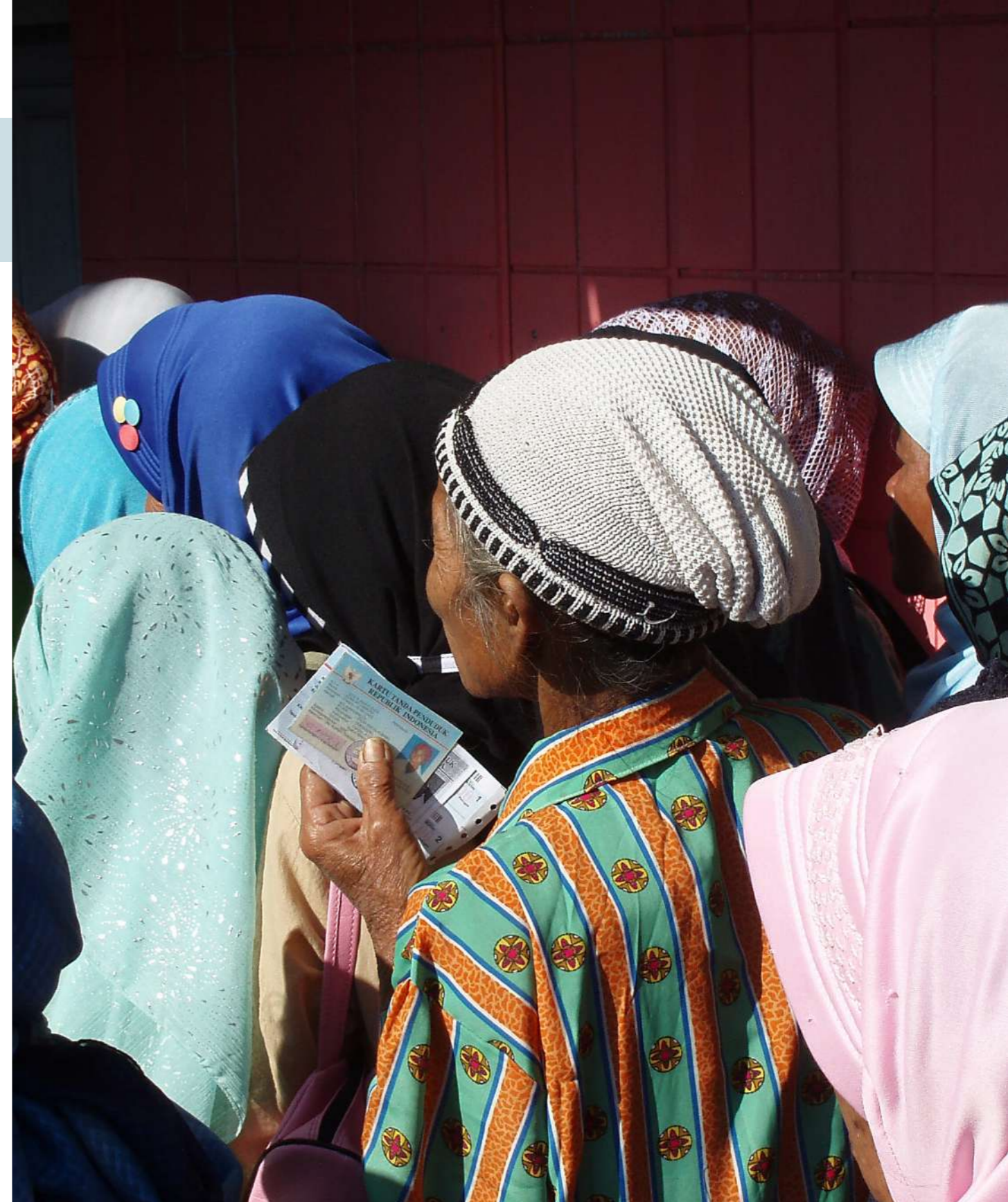
Studi pertama adalah “Rapid Assessment under Unideal Situation-The Impact of the Indonesian National Health Insurance on Poverty: A Microsimulation” yang dipaparkan Goldy Fariz Dharmawan dalam The Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Annual Scientific Meeting pada 6 November 2019 di Bali. Studi ini bertujuan melihat risiko yang dihadapi masyarakat miskin jika mereka tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan hasil simulasi, JKN mampu menolong sekitar 1,18 juta orang keluar dari kemiskinan. Hasil simulasi ini juga menunjukkan bahwa tanpa JKN sebagian masyarakat miskin harus mengeluarkan uang pribadi ketika mengakses layanan kesehatan. Besaran pengeluaran tersebut bahkan dapat mencapai 12,3 juta rupiah.

Studi kedua adalah “The Effectiveness of Cash Transfer in Reducing Poverty and Inequality: Evidence from Two Programs in Indonesia” yang dilakukan oleh Niken Kusumawardhani, Ridho Al Izzati, dan Asep Suryahadi. Studi ini bertujuan melihat dampak program bantuan tunai bersyarat pada kemiskinan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa program-program perlindungan sosial, seperti PKH, berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan tetapi tidak secara signifikan menurunkan ketimpangan. Hasil studi ini disampaikan dalam Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2019 yang diselenggarakan The SMERU Research Institute di Jakarta.

Studi ketiga adalah studi tentang penghidupan rumah tangga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Studi ini merupakan kerja sama antara The SMERU Research Institute, Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh Sejahtera (MAHKOTA), dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang hasilnya secara resmi diluncurkan pada 13 Februari 2020 di Jakarta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa meski PKH telah memberikan pemasukan tambahan bagi rumah tangga miskin, pemerintah masih perlu merancang sebuah sistem yang komprehensif dan terpadu untuk mengembangkan strategi penghidupan rumah tangga miskin dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan PKH. Laporan studi ini dilengkapi dengan pilihan intervensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah.

Pada November 2019, The SMERU Research Institute mendapat penghargaan dari Kemensos sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap keberhasilan PKH. Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, pada malam puncak penganugerahan PKH 2019.

Studi-studi di atas menunjukkan bahwa penelitian yang berkualitas sangat diperlukan untuk memahami manfaat program perlindungan sosial dan dampaknya, terutama pada masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, pemerintah masih perlu mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi dengan program penghidupan yang berkelanjutan agar masyarakat miskin dan rentan dapat lebih berdaya secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. 🐟



Pemerintah masih perlu mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi dengan program penghidupan yang berkelanjutan agar masyarakat miskin dan rentan dapat lebih berdaya secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

[Lokasi: Cianjur, Jawa Barat]

PERSPEKTIF INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN PENURUNAN KEMISKINAN YANG BERKELANJUTAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di angka 5%–6% per tahun selama sepuluh tahun terakhir. Angka kemiskinan terus turun dari 14,2% pada 2009 menjadi 9,41% pada 2019. Meski pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan, ketimpangan memiliki tren yang stagnan di angka 0,38–0,41.


Kondisi ketimpangan yang stagnan di angka relatif tinggi tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua kelompok masyarakat menikmati pertumbuhan ekonomi yang sama. Kelompok masyarakat kelas menengah ke atas tumbuh lebih cepat daripada masyarakat kelas bawah. Hal yang tidak diharapkan dari tingginya ketimpangan adalah risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada melemahnya kemampuan suatu wilayah dalam menurunkan kemiskinan.

Salah satu situasi tersebut tergambar dari kajian diagnostik kemiskinan yang dilakukan SMERU di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Studi tersebut diselenggarakan atas dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) di bawah payung nota kesepahaman (MoU) antara SMERU dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pangkep. Kajian ini memberi perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Pangkep tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Wilayah yang kegiatan ekonominya masih bergantung pada sumber daya alam ekstraktif rentan terhadap kondisi tersebut terutama karena kegiatan ekonominya lebih padat modal ketimbang padat tenaga kerja.

Keterlibatan berbagai komponen masyarakat diperlukan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan. Dengan kata lain, pemerintah perlu mendorong lahirnya kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dengan memperluas akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga miskin dan mereka yang selama ini terpinggirkan, untuk terlibat dan merasakan manfaat pembangunan. Dengan

demikian, kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah dapat segera berkurang.

Selain itu, SMERU juga terus memberikan dukungan untuk pemanfaatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang telah dibangun bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 2017. Pada 2019, dilakukan serangkaian kajian dan diskusi mengenai pemanfaatan IPEI untuk meningkatkan inklusifitas pembangunan dengan tujuh pemerintah provinsi: Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bali, Banten, dan Jawa Barat. Pada diskusi tersebut, selain membahas pilar dan indikator IPEI di tingkat provinsi, juga didiskusikan IPEI di tingkat kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Penyusunan IPEI hingga tingkat kabupaten/kota tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama dengan Bappenas dengan dukungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam negeri dan Ford Foundation. Dengan adanya IPEI di tingkat kabupaten/kota, baik pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat memiliki satu alat rujukan tambahan untuk mengidentifikasi berbagai indikator pembangunan yang perlu ditingkatkan agar pembangunan ekonomi di suatu wilayah menjadi lebih inklusif.

Di Jawa Barat, berdasarkan hasil kajian IPEI dan kemiskinan dilakukan diskusi kebijakan dalam bentuk Forum Pembangunan Daerah (FPD) yang bertajuk “Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan”. Forum yang diselenggarakan pada Juli 2019 ini dihadiri oleh sebagian besar perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dan menjadi ajang pertukaran pengetahuan, tidak hanya antarpemerintah daerah, tetapi juga di antarakademi dan antarwakil organisasi masyarakat. Di tingkat nasional, hasil kajian IPEI di berbagai daerah ini juga dijadikan bahan penyusunan Peta Jalan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia, yang merupakan studi *Background* RPJMN 2020–2024 dan disusun bersama Bappenas dengan dukungan KSI. 



Pemerintah perlu mendorong lahirnya kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dengan memperluas akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga miskin dan mereka yang selama ini terpinggirkan, untuk terlibat dan merasakan manfaat pembangunan.

[Lokasi: Jakarta]

Kredit foto: Mukti Mulyana/SMERU

PETA CAKUPAN WILAYAH PENELITIAN



CAKUPAN NASIONAL

1 2 5 11 13 17 22 31 32 33 34 39

Nasional & studi kasus di beberapa provinsi

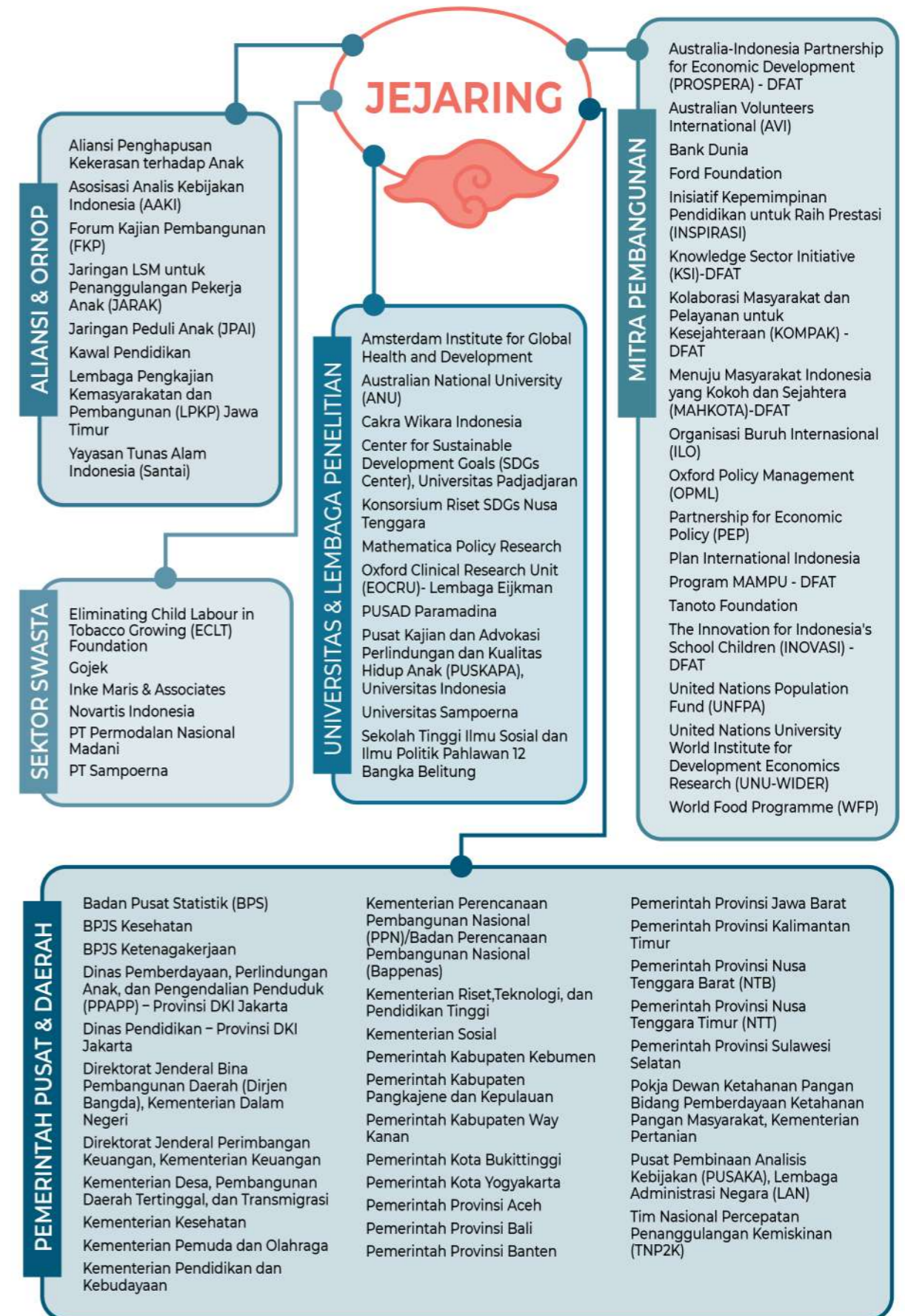
6* 12* 22* 28* 35* 36* 37*

4* 21* 29* Cakupan beberapa provinsi dan studi kasus

25* Diseminasi dan studi kasus

LEGENDA PETA CAKUPAN WILAYAH PENELITIAN

- 1 Studi *Baseline* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tentang Remaja dan Pemuda
- 2 Studi *Background* RPJMN 2020–2024 tentang Pemuda
- 3 Tata Kelola Desa & Pemberdayaan Masyarakat (*Sentinel Villages*)
- 4* Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah: Efektivitas Biaya di Tingkat Provinsi
- 5 Penyusunan Standar Kompetensi—Tim Koordinasi Strategis Penguatan Tenaga Pendamping Pembangunan (TKSP3)
- 6* Mengembangkan Peta Jalan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia (Studi *Background* RPJMN 2020–2024)
- 7 Pemantauan Evaluasi Kualitatif Dampak EINRIP: Penelitian Sosial Kualitatif Pascaperbaikan 2018
- 8 Survei *Baseline* Program Air untuk Perempuan
- 9 Menguji Metode SAE untuk Pembuatan Peta Gizi di Indonesia
- 10 Identifikasi Intervensi Penghidupan Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- 11 Keterampilan Kognitif, Kewirausahaan & Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- 12* Revisi Indeks Demokrasi Indonesia
- 13 Survei Kapasitas Penelitian Ornop dan Lembaga Penelitian
- 14 Studi Kasus: Memahami Faktor-faktor yang Berkontribusi pada Variasi Prevalensi *Stunting* di Pemerintah Daerah Terpilih
- 15 Kajian Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Pesisir Pantai di Jakarta
- 16 Kajian Penyelenggaraan SMP Terbuka di Jakarta
- 17 Kajian Pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan
- 18 Menguji Metode SAE untuk Pembuatan Peta Gizi di Indonesia: Kabupaten Rokan Hulu
- 19 Menguji Standar Kompetensi Tenaga Penyuluh Pengembangan—TKSP3
- 20 Kajian Laporan Pembangunan Daerah 2019
- 21* Analisis Dampak Prukades pada Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Desa yang Inklusif
- 22* Menuju Era Ekonomi Digital yang Lebih Inklusif: Tinjauan Kebijakan
- 23 Menilai Risiko dan Bahaya Terkait dengan Budidaya dan Produksi Tembakau di Indonesia
- 24 Penelitian Data Awal untuk Program Rintisan Inisiatif Kepemimpinan Pendidikan untuk Raih Prestasi (INSPIRASI)
- 25* Lanjutan Dukungan Pemanfaatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
- 26 Akses Perempuan Miskin ke Layanan Publik—Studi *Endline*
- 27 Verifikasi dan Pemantauan Eksternal Dampak Program Praktik Tenaga Kerja Pertanian PMI di Indonesia
- 28* Pemutakhiran Kajian Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia 2019
- 29* Mempromosikan Adopsi Kebijakan Pembangunan Inklusif di Provinsi Kaya Sumber Daya Alam
- 30 Studi *Baseline* tentang Pekerja Anak di Daerah Perkebunan Tembakau Rakyat di Indonesia
- 31 Kemajuan dan Stagnasi dalam Penghidupan Pekerja Informal di Ekonomi yang Sedang Berkembang: Bukti Jangka Panjang dari Indonesia
- 32 Indeks Pembangunan Pemuda, Catatan Kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Pemuda
- 33 Kajian Tematik Sektor Pendidikan
- 34 Dampak Heterogen Ketersediaan Internet pada Hasil Pasar Tenaga Kerja Perempuan di Ekonomi yang Berkembang: Bukti dari Indonesia
- 35* Perekrutan dan Penempatan Guru
- 36* Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan
- 37* Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru dalam Jabatan
- 38 KIAT Guru/Tunjangan atas Kinerja Guru
- 39 Analisis Dampak Ujian Nasional
- 40 Laboratorium Pembelajaran: Faktor Pendukung atau Penghambat Inovasi Kebijakan Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota di Yogyakarta dan Bukittinggi
- 41 Laboratorium Pembelajaran: Dampak Kebijakan Pendidikan di Kota Bukittinggi (Mekanisme Kebijakan Rekrutmen Guru Honorer)
- 42 Laboratorium Pembelajaran: Dampak Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Way Kanan (Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah melalui Mekanisme “Kartu Rapor” Sekolah dan Insentif Berbasis Kinerja)
- 43 Laboratorium Pembelajaran: Dampak Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Kebumen (Mengaktifkan Peran Orang Tua dan Komunitas dalam Pembelajaran)
- 44 Laboratorium Pembelajaran: Dampak Kebijakan Pendidikan di Kota Yogyakarta (Dampak Program Pendaftaran Siswa Baru (PPDB) Berbasis Zonasi terhadap Pembelajaran)



SOROTAN NONPENELITIAN

Bincang Media: Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Berkualitas

SMERU menyelenggarakan bincang-bincang media bertajuk “Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Berkualitas” pada 15 Agustus 2019. Acara ini menghadirkan pembicara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gojek, dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, serta mengundang jurnalis dari berbagai media. Acara ini bertujuan menyebarkan diskursus pertumbuhan ekonomi digital yang berkualitas pada era revolusi digital.



Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

SMERU bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Knowledge Sector Initiative (KSI), dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) menyelenggarakan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta pada 3-5 Desember 2019. Peserta kegiatan ini berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN. Pelatihan ini menawarkan pemahaman dasar terkait konteks, konsep, dan teknik dasar analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bukti.



Forum Pembangunan Daerah

SMERU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah (FPD) yang mengangkat tema “Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat” pada 30 Juli 2019. Acara ini didukung oleh DFAT-Kedutaan Besar Australia, KSI, Ford Foundation, Kementerian Dalam Negeri, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Telkom Indonesia.



The 12th Asia Pacific Future Trends Forum (FTF)

Pada 21 November 2019, SMERU menjadi mitra penyelenggara The 12th Asia Pacific Future Trends Forum (FTF), sebuah forum tahunan yang mempertemukan para pemangku kepentingan utama bidang kesehatan di kawasan Asia Pasifik untuk membahas berbagai masalah yang menjadi perhatian umum dalam sistem perawatan kesehatan. FTF 2019 mengangkat tema “Roadmap to Universal Health Care: Acceleration through Public-Private Partnership”.



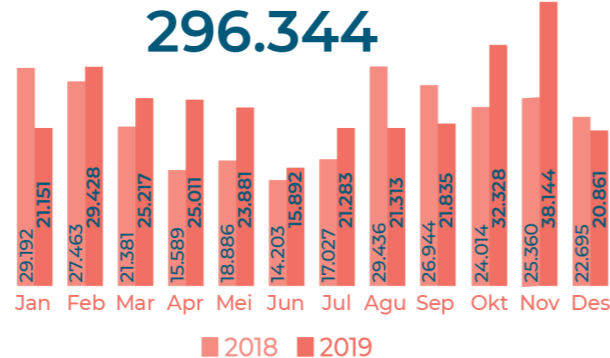
SMERU DI INTERNET & MEDIA SOSIAL



Laporan paling banyak diunduh:

5.809 views
Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcomes: Evidence from Indonesia
External Publication, September 2019

Jumlah page views pada 2019:



Hingga akhir Desember 2019
5.103 pengikut

↑ 28% sepanjang 2019



Hingga akhir Desember 2019
8.081 pengikut

↑ 216% sepanjang 2019



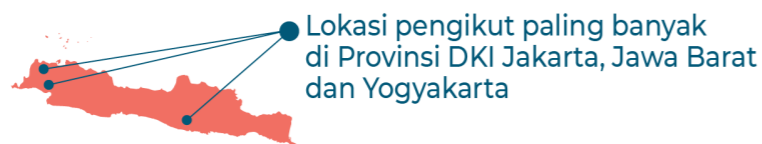
Hingga akhir Desember 2019
798 subscribers

↑ 144,7% sepanjang 2019
Total views **22.156** views

Video yang paling banyak ditonton: **1.999** views
Video wawancara SMERU dengan Bapak Bambang Widianto (TNP2K): "Pengelolaan dan Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT)"



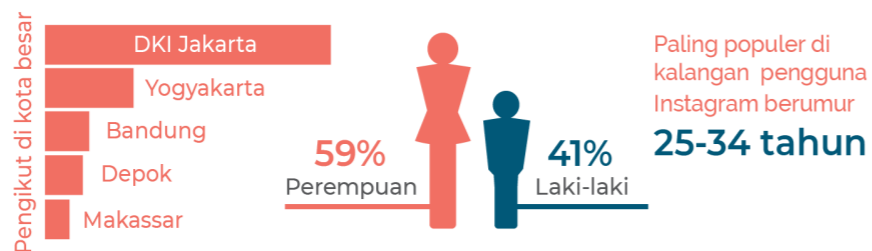
Hingga akhir Desember 2019
2.486 pengikut



PROGRAM RISE



Hingga akhir Desember 2019
888 pengikut



DATA & INFORMASI

Peta Kemiskinan

www.povertymap.smeru.or.id

POVERTY MAP



Peta Status Gizi di Indonesia

www.smeru.or.id/nutmap/



Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

<http://inklusif.bappenas.go.id/>



Pangkalan Data Regional




www.smeru.or.id/id/data-informasi/pangkalan-data-regional

Pangkalan Data Ornop



www.smeru.or.id/id/ngo/contact

PUBLIKASI

 Diunggah ke web
  Cetak

21 LAPORAN PENELITIAN

1. *The Well-Being of Poor Children Left by Their Mothers who Become Migrant Workers: Case Study in Two Kabupaten in Indonesia* [Kesejahteraan Anak Keluarga Miskin yang Ditinggal Ibu Pekerja Migran: Studi Kasus di Dua Kabupaten di Indonesia]
Mayang Rizky, Yudi Fajar M. Wahyu, Hafiz Arfyanto, Sofni Indah Arifa Lubis, Emmy Hermanus, Joseph Natanael Marshan, Nila Warda, Niken Kusumawardhani, Nina Toyamah
2. *Testing Small Area Estimation (SAE) Method for Generating Nutrition Maps in Indonesia: Rokan Hulu District* [Pengujian Metode Small Area Estimation (SAE) untuk Pembuatan Peta Status Gizi di Indonesia: Kabupaten Rokan Hulu]
Asep Kurniawan, Elza Elmira, Maudita Dwi Anbarani, Mayang Rizky, Nurmala Selly Saputri, Ridho Al Izzati, Ruhmaniyati
3. *Pengujian Metode Small Area Estimation (SAE) untuk Pembuatan Peta Status Gizi di Indonesia: Kabupaten Rokan Hulu*
Asep Kurniawan, Elza Elmira, Maudita Dwi Anbarani, Mayang Rizky, Nurmala Selly Saputri, Ridho Al Izzati, Ruhmaniyati
4. *Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 1: Akses Perempuan Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial*
Dyan Widyaningsih, Niken Kusumawardhani
5. *Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja*
Ana Rosidha Tamyis, Nila Warda
6. *Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 3: Akses Perempuan Buruh Migran Luar Negeri terhadap Layanan Perlindungan*
Stella Aleida Hutagalung, Veto Tyas Indrio
7. *Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 4: Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Perempuan*
Dyan Widyaningsih, Elza Elmira, Dinar Dwi Prasetyo
8. *Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 5: Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan*
Ana Rosidha Tamyis, Niken Kusumawardhani, Fatin Nuha Astini
9. *Laporan Sintesis Studi Midline Mampu: Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Publik pada Lima Tema Penghidupan*
Dinar Dwi Prasetyo, Dyan Widyaningsih, Ana Rosidha Tamyis, Niken Kusumawardhani
10. *Studi Tematik Undang-Undang Desa Merancang Strategi dan Skenario Pendampingan di Desa*
Palmira Permata Bachtiar, Asep Kurniawan, Rendy Adriyan Diningrat, Gema Satria Mayang Sedyadi, Ruhmaniyati
11. *Laporan Studi Kasus Undang-Undang Desa: Menelusuri Manfaat Belanja Desa*
Palmira Permata Bachtiar, Asep Kurniawan, Gema Satria Mayang Sedyadi, Rendy Adriyan Diningrat, Ruhmaniyati, Ulfa Alifia
12. *Kajian Penyelenggaraan SMP Terbuka di Provinsi DKI Jakarta*
Asep Kurniawan, Elza Elmira, Maudita Dwi Anbarani, Mayang Rizky, Nurmala Selly Saputri, Ridho Al Izzati, Ruhmaniyati
13. *Keteringgalan dalam Kemakmuran: Tantangan Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*
Widjajanti Isdijoso, Mayang Rizky, Veto Tyas Indrio, Ana Rosidha Tamyis
14. *Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Laporan Endline*
Palmira Permata Bachtiar, Asep Kurniawan, Gema Satria Mayang Sedyadi, Rendy Adriyan Diningrat, Ruhmaniyati
15. *EINRIP Monitoring & Evaluation Post Improvement Qualitative Social Research: Monitoring Report 2018* [Kajian Pemantauan dan Evaluasi Sosial Kualitatif Pascaperbaikan EINRIP: Laporan Pemantauan 2018]
Dinar Dwi Prasetyo, Dyan Widyaningsih, Rezanti Putri Pramana, Steve Christiantara
16. *Menstrual Hygiene Management (MHM): A Case Study of Primary and Junior High School Students in Indonesia* [Manajemen Kesehatan Menstruasi: Studi Kasus Siswa SD dan SMP di Indonesia]
Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana
17. *Studi Kasus Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) Siswa SD dan SMP di Indonesia*
Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana
18. *Gender and Social Inclusion (GESI) Contextual Analysis/Formative Research for the Plan's Water for Women in Indonesia* [Analisis Kontekstual/ Penelitian Formatif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk Program Water for Women (WfW) Plan Internasional di Indonesia]
Dinar Dwi Prasetyo, Fatin Nuha Astini, Rizki Fillaili, Herry Widjanarko
19. *Analisis Kontekstual/ Penelitian Formatif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk Program Water for Women (WfW) Plan Internasional di Indonesia*
Dinar Dwi Prasetyo, Fatin Nuha Astini, Rizki Fillaili, Herry Widjanarko
20. *Diagnostic Study of Child Labour in Rural Areas (with Special Emphasis on Tobacco Farming)* [Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan (dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan Tembakau Rakyat)]
Emmy Hermanus, Stella Aleida Hutagalung, Rezanti Putri Pramana, Fatin Nuha Astini, Elza Elmira, Veto Tyas Indrio, Widjajanti Isdijoso
21. *Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan (dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan Tembakau Rakyat)*
Emmy Hermanus, Stella Aleida Hutagalung, Rezanti Putri Pramana, Fatin Nuha Astini, Elza Elmira, Veto Tyas Indrio, Widjajanti Isdijoso

7 KERTAS KERJA

1. *Education in Indonesia: A White Elephant? [Pendidikan di Indonesia: Sebuah Kembaziran]*
Sandra Kurniawati, Daniel Suryadarma, Luhur Bima, Asri Yusrina
2. *Understanding Metropolitan Poverty: The Profile of Poverty in Jabodetabek Area* [Memahami Kemiskinan Metropolitan: Profil Kemiskinan di Wilayah Jabodetabek]
Asep Suryahadi, Cecilia Marlina
3. *Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia, 2006-2016*
Nila Warda, Rachma Indah Nurbani, Elza Elmira, Ridho Al Izzati, Mayang Rizky
4. *Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan dalam Desa?*
Nila Warda, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Indah Nurbani, Ridho Al Izzati
5. *Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance* [Kesetaraan Gender dalam Situasi Pembangunan Terkini di Indonesia: Kasus Tata Kelola Desa yang Partisipatoris]
Nila Warda, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Indah Nurbani, Ridho Al Izzati
6. *Developing an Unemployment Insurance Scheme for Indonesia* [Mengembangkan Skema Asuransi bagi Pengangguran di Indonesia]
Meuthia Rosfadhila
7. *The Stock of Highly Skilled Individuals in Indonesia* [Stok Individu Berketerampilan Tinggi di Indonesia]
Sandra Kurniawati, Daniel Suryadarma

3 BULETIN

1. *Buletin SMERU No. 2/2019 Versi Bahasa Indonesia*
Liza Hadiz, Budhi Adrianto, Dhanita Putri Sarahtika, Gunardi Handoko, Wiwin Purbaningrum
2. *Buletin SMERU No. 1/2019 Versi Bahasa Indonesia*
Liza Hadiz, Budhi Adrianto, Dhanita Putri Sarahtika, Gunardi Handoko, Wiwin Purbaningrum, Wenny Wandasari, Santi Kusumaningrum
3. *Buletin SMERU No. 1/2019 Versi Bahasa Inggris*
Liza Hadiz, Budhi Adrianto, Dhanita Putri Sarahtika, Gunardi Handoko, Wiwin Purbaningrum, Wenny Wandasari, Santi Kusumaningrum

6 CATATAN KEBIJAKAN

1. *Mengoptimalkan Pendampingan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa*
Asep Kurniawan, Gema Satria Mayang Sedyadi, Rini Kusnadi, Ruhmaniyati
2. *Pinjaman Berbasis Pendapatan untuk Meningkatkan Akses terhadap Pendidikan Tinggi*
Elza Elmira, Daniel Suryadarma, Asep Suryahadi
3. *Simplifying the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa)* [Menyederhanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa]
Asep Kurniawan
4. *Reviving the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa)* [Menghidupkan Kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa]
Asep Kurniawan
5. *Improving Cognitive Skills for Entrepreneurial Productivity and Growth in Indonesia* [Meningkatkan Keterampilan Kognitif Demi Produktivitas dan Pertumbuhan Kewirausahaan di Indonesia]
Niken Kusumawardhani, Daniel Suryadarma, Luca Tiberti, Veto Tyas Indrio
6. *Meningkatkan Keterampilan Kognitif Demi Produktivitas dan Pertumbuhan Kewirausahaan di Indonesia*
Niken Kusumawardhani, Daniel Suryadarma, Luca Tiberti, Veto Tyas Indrio

1 PROSIDING

1. *12th Asia Pacific Future Trends Forum "Roadmap to Universal Health Care: Acceleration through Public-Private Partnership"* [Asia Pacific Future Trends Forum Ke-12 "Peta Jalan Menuju Pelayanan Kesehatan Universal: Percepatan Menuju Kemitraan Publik-Swasta"]

1 LAPORAN TAHUNAN

1. *Laporan Tahunan 2018*

4 ARTIKEL JURNAL

KETERLIBATAN DALAM PROSES KEBIJAKAN

KEMISKINAN

- Menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial mengenai upaya peningkatan penghidupan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- Memberikan pelatihan "Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan" bagi aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN
- Menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov Jawa Barat mengenai pembangunan ekonomi inklusif untuk penurunan kemiskinan yang berkelanjutan di Jawa Barat

KETIMPANGAN

- Menyampaikan memo "Perspektif tentang Kondisi Terkini Ketimpangan di Indonesia" kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
- Membantu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaksanakan studi pendahuluan tentang pembangunan inklusif untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024
- Mendukung Bappenas dalam penyusunan dan pemanfaatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di tingkat nasional dan di lima provinsi–Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sulawesi Selatan

PENDIDIKAN

- Menyampaikan rekomendasi peningkatan kualitas pelatihan guru dalam jabatan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi
- Bekerja sama dalam melakukan penelitian dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar di Provinsi DKI Jakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bukittinggi
- Membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyempurnaan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

PEMBANGUNAN PERDESAAN

- Menyampaikan rekomendasi penurunan ketimpangan pembangunan di perdesaan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) serta Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
- Menyampaikan rekomendasi perbaikan tata kelola desa dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa kepada Kemendes PDTT dan Bappenas
- Menyampaikan rekomendasi terkait upaya pengembangan ekonomi perdesaan melalui Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) kepada Kemendes PDTT

GIZI DAN KETAHANAN PANGAN

- Menyusun peta gizi yang menyajikan estimasi status gizi anak balita di tingkat desa di enam kabupaten–Rokan Hulu, Jember, Timor Tengah Selatan, Tasikmalaya, Lampung Tengah, dan Pematang–bersama TNP2K) Bank Dunia, dan Yayasan Tanoto
- Menyusun kajian strategis ketahanan pangan dan gizi bersama World Food Programme (WFP)

PEMUDA DAN GENDER

- Membantu Bappenas melaksanakan studi *Background* tentang pembangunan pemuda untuk RPJMN 2020–2024
- Menyampaikan rekomendasi hasil penelitian studi MAMPU terkait akses perempuan ke perlindungan sosial, layanan kesehatan reproduksi, perlindungan pekerja rumahan dan tenaga kerja migran, dan layanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga kepada Bappenas, Program MAMPU, dan mitra-mitra MAMPU

PEMBANGUNAN EKONOMI

- Menyampaikan rekomendasi teori perubahan dampak perbaikan jalan nasional terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden
- Membantu Bappenas dalam mengevaluasi pembangunan daerah Provinsi Aceh, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, dan Riau

EKONOMI DIGITAL

- Menyelenggarakan bincang-bincang media tentang ekonomi digital yang inklusif di Indonesia
- Melakukan analisis dan menyelenggarakan rangkaian diskusi mengenai ekonomi digital yang inklusif dengan pemangku kepentingan terkait

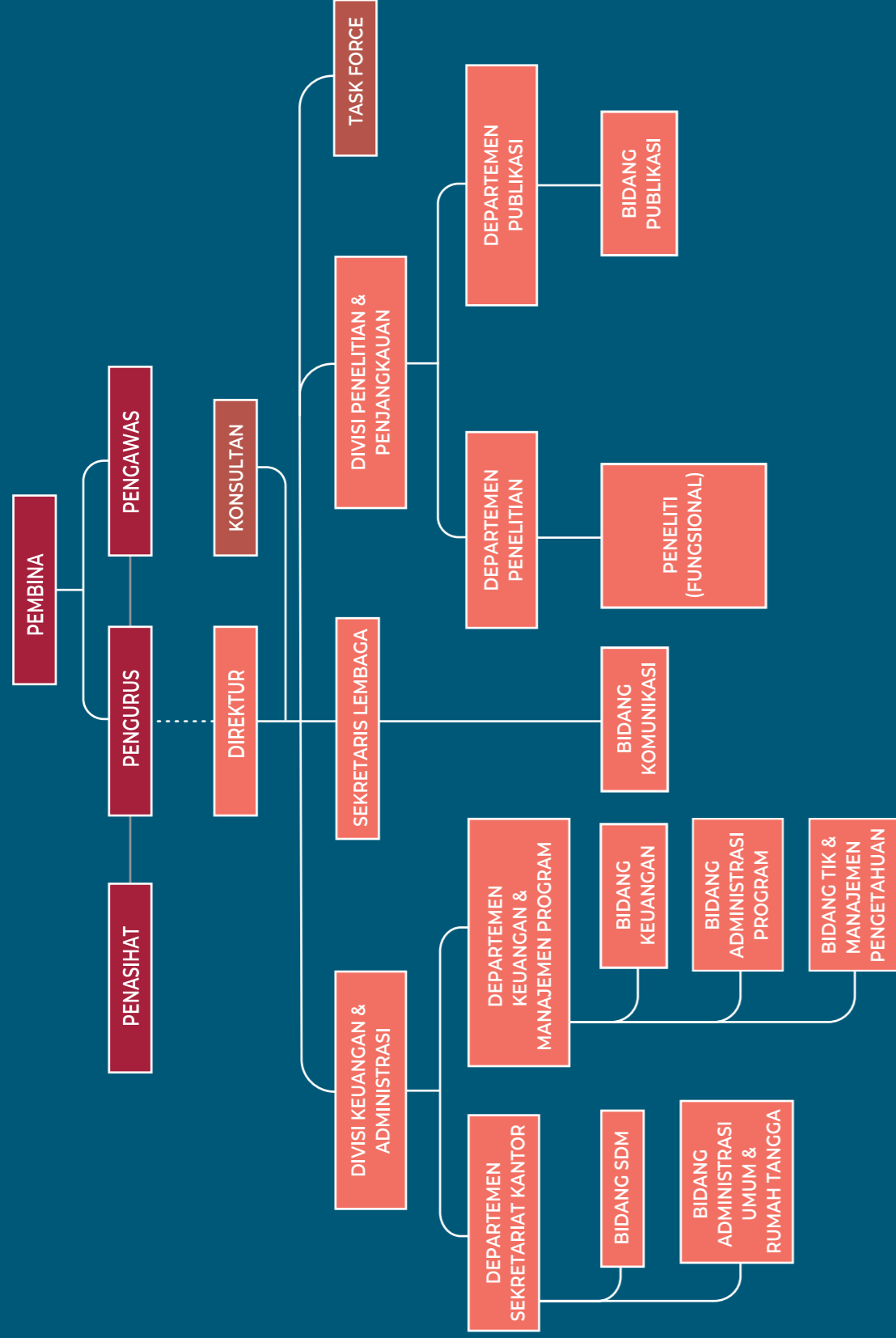
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

- Menyampaikan rekomendasi kebijakan sebagai masukan penyusunan *Omnibus Law* bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
- Menyampaikan rekomendasi upaya peningkatan kewirausahaan UMKM kepada Bappenas, Kementerian KUKM, dan publik

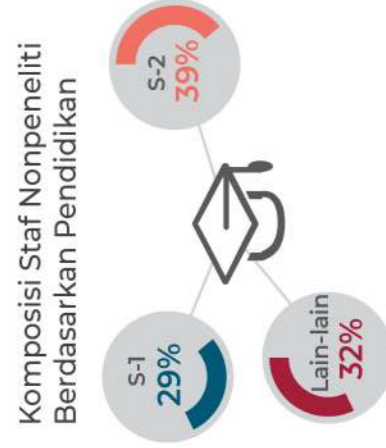
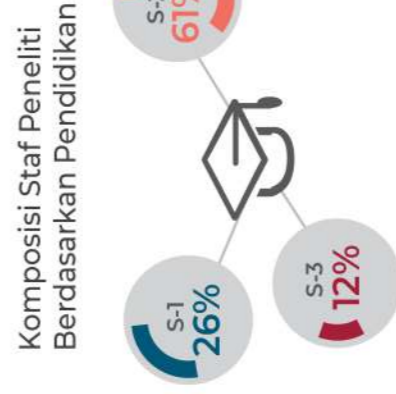
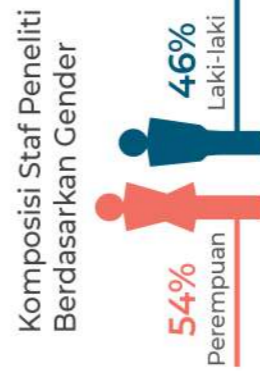
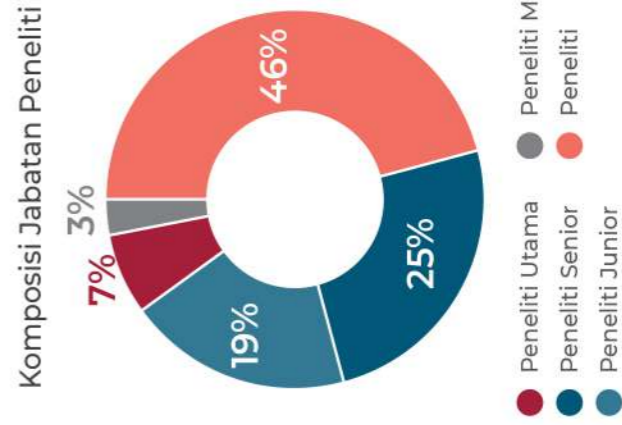
LAINNYA

- Membantu Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan (TKSP3) menyusun standar kompetensi nasional bagi tenaga pendamping pembangunan dan melakukan uji sah atas unit-unit kompetensi yang telah dirancang
- Bersama CWI dan Pusad Paramedina, membantu Bappenas dalam pembaruan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

STRUKTUR ORGANISASI



PROFIL STAF



Keluarga besar The SMERU Research Institute



YAYASAN SMERU

Laporan Aktivitas & Perubahan Aset Bersih per 31 Desember 2019 dan 2018

	2019 (Unaudited)			2018 (Unaudited)
	Terikat temporer	Tidak terikat	Terikat permanen	Jumlah
Penerimaan				
Penerimaan dari donor	36,745,914,070	-	-	36,745,914,070
Penerimaan dari lain-lain	1,308,237,219	-	-	1,308,237,219
Laba / rugi yang belum realisasi	-	-	-	-
Jumlah penerimaan	38,054,151,289	-	-	38,054,151,289
Pengeluaran				
Beban program	22,834,233,288	-	-	22,834,233,288
Beban operasional	-	16,585,638,345	-	16,585,638,345
Beban penyusutan	-	202,865,981	-	202,865,981
Beban lain-lain	-	68,205,372	-	68,205,372
Jumlah pengeluaran	22,834,233,288	16,856,709,698	-	39,690,942,986
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	15,219,918,001	(16,856,709,698)	-	(1,636,791,697)
Aset Neto Awal Tahun	32,111,156,385	4,255,153,459	126,769,675	36,493,079,520
Koreksi	-	35,563,136	-	35,563,136
Aset Bersih Akhir Tahun	47,331,074,387	12,565,993,102	126,769,675	34,891,850,959
				36,493,079,520

YAYASAN SMERU

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2019 dan 2018

	2019 (Unaudited)	2018 (Unaudited)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Perubahan aset bersih	(1,636,791,697)	(3,936,056,903)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi kelebihan penerimaan atas pengeluaran pada kas bersih diperoleh dari		
Penyusutan Laba/rugi yang belum direalisasi atas Investasi	202,865,981	277,698,454
Penurunan (peningkatan) pada:		
Uang muka	(100,481,100)	(260,774,333)
Piutang	(42,214,599)	154,460,367
Biaya dibayar dimuka	39,197,042	(80,258,413)
Utang pajak	84,598,900	48,136,650
Biaya yang masih harus dibayar	(29,551,250)	7,814,875
Utang Donor	3,307,887,024	-
Utang lain-lain	157,732,774	10,575,917
Kewajiban imbalan kerja	740,200,000	752,230,000
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2,723,443,075	(3,026,173,387)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan investasi	17,691,931,161	22,592,759,769
Penempatan pada investasi	(16,391,258,987)	(17,691,931,161)
Perolehan aset tetap	(21,357,000)	(88,148,000)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	1,279,315,175	4,812,680,608
Penurunan Bersih Kas	4,002,758,250	1,786,507,221
Kas dan setara kas, awal	12,989,688,328	11,043,609,597
Koreksi	35,563,136	159,571,510
Kas dan setara kas, akhir	17,028,009,714	12,989,688,328

YAYASAN SMERU

Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 dan 2018

	2019 (Unaudited)	2018 (Unaudited)
ASET		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	17,028,009,714	12,989,688,328
Investasi jangka pendek	16,391,258,987	17,691,931,161
Uang muka	394,255,433	293,774,333
Piutang lain-lain	516,099,626	473,885,027
Biaya dibayar dimuka	273,709,510	312,906,552
Jumlah aset lancar	34,603,333,270	31,762,185,401
Aset tidak lancar		
Aset tetap - bersih	8,201,017,940	8,382,526,920
Jumlah aset tidak lancar	8,201,017,940	8,382,526,920
Jumlah aset	42,804,351,209	40,144,712,322
LIABILITAS DAN ASET BERSIH		
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pajak	272,141,650	187,542,750
Biaya yang masih harus dibayar	2,250,425	31,801,675
Utang Donor	3,307,887,024	-
Utang lain-lain	170,471,151	12,738,377
Kewajiban imbalan kerja	4,159,750,000	3,419,550,000
Jumlah kewajiban	7,912,500,250	3,651,632,802
Aset bersih		
Tidak terikat	(12,565,993,102)	4,255,153,459
Terikat temporer	47,331,074,387	32,111,156,385
Terikat permanen	126,769,675	126,769,675
Jumlah aset bersih	34,891,850,959	36,493,079,520
Jumlah kewajiban dan aset bersih	42,804,351,209	40,144,712,322



**Dr. Joan
Hardjono**

1936–2019



Mengenang Dr. Joan Hardjono

Dr. Joan Hardjono adalah intelektual yang berpengaruh dalam penelitian kebijakan dan telah ikut memantapkan standar penelitian sosial-ekonomi yang berkualitas. Joan mewariskan semangatnya kepada kita untuk terus mengabdikan melalui pekerjaan penelitian. Menurut Joan, hanya dengan berinvestasi dalam penelitian yang cermat kita dapat memastikan kesinambungan antara penelitian, saran kebijakan, dan strategi pelaksanaannya. Hasil kerjanya telah menginspirasi banyak akademisi untuk melakukan penelitian sosial-ekonomi secara empiris dan kritis tentang cara menanggulangi kemiskinan dan berbagai permasalahan masyarakat tanpa melupakan keberagaman dan kapasitas Indonesia.

Joan bukan hanya seorang peneliti yang luar biasa, tetapi juga seorang mentor yang selalu punya waktu untuk memberikan umpan balik substantif pada pekerjaan dan pertumbuhan profesional staf SMERU. Kesabaran, kecerdasan, dan dedikasinya membantu membimbing SMERU untuk menjadi salah satu lembaga penelitian kebijakan Indonesia yang terkemuka dalam hal kualitas dan integritas, baik di dalam maupun di luar negeri.



DEWAN REDAKSI

- ☞ Widjajanti Isdijoso
- ☞ Hesti Marsono
- ☞ Athia Yumna
- ☞ Nuning Akhmadi
- ☞ Liza Hadiz
- ☞ Ratri Indah Septiana

REDAKSI

Pengumpul Data

- ☞ Bambang Cahyono Hadi
- ☞ Budhi Adrianto
- ☞ Mirna Wildani
- ☞ Mukti Mulyana
- ☞ Rini Kusnadi

Editor

- ☞ Budhi Adrianto
- ☞ Dhania Putri Sarahtika
- ☞ Gunardi Handoko
- ☞ Wiwin Purbaningrum

Desainer Grafis

- ☞ Novita Maizir

Staf Distribusi


- ☞ Hariyanti Sadaly

Foto Sampul

- ☞ Mukti Mulyana



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;
+6221 3193 0850 (fax)

 smeru@smeru.or.id

 www.smeru.or.id
www.rise.smeru.or.id

   The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 @smeru.institute
[@riseprogramme](https://www.instagram.com/riseprogramme)



9 772597 881003